ORANGE BOOK V

IPB Press

EKONOMI & MANAJEMEN

KETAHANAN PANGAN

Yusman Syaukat | Widyastutik | Adrianus Dwi Siswanto | A. Faroby Falatehan | Eka Puspitawati | Noer Azam Achsani | Nurlatifah | Sri Mulatsih | Novindra | Lukytawati Anggraeni | Vera Lisna | Nila Rifai | Rachmat Pambudy | Aceng Hidayat | Salahuddin El Ayyubi | Muhammad Findi A | Sahara | Bonar M. Sinaga | D.S.Priyarsono | Amzul Rifin | R. Dikky Indrawan | M. Syaefudin Andrianto | Alim Setiawan Slamet | Lindawati Kartika | R. Dikky Indrawan | Fauzan Zamahsyarie | Rizka Amalia Nugrahapsari | Rita Nurmalina | Heny K. Suwarsinah

Penyunting:

M. Firdaus, Amzul Rifin, Sahara, Novindra, M. Syaefudin Andrianto

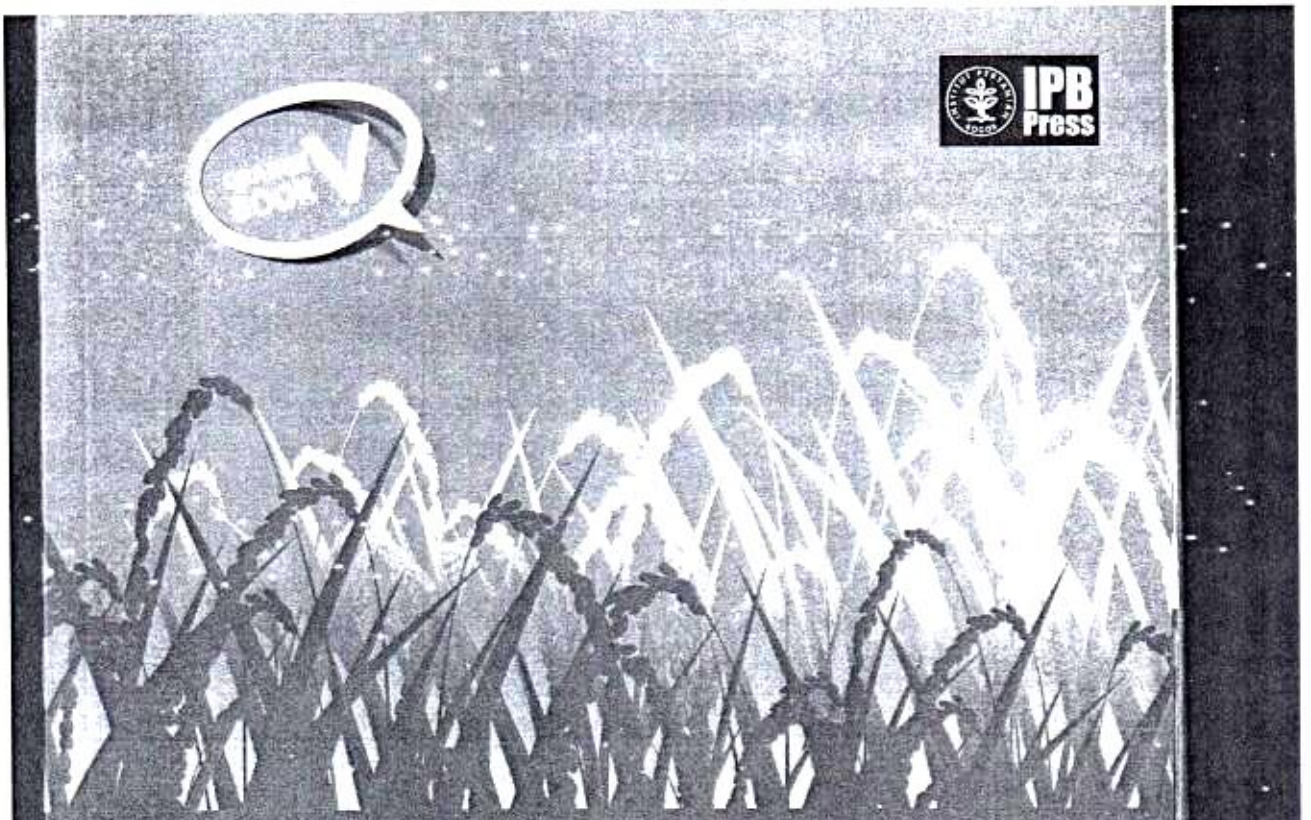

EKONOMI & MANAJEMEN

KETAHANAN PANGAN

Yusman Syaukat | Widyastutik | Adrianus Dwi Siswanto | A. Faroby Falatehan | Eka Puspitawati | Noer Azam Achsani | Nurlatifah | Sri Mulatsih | Novindra | Lukytawati Anggraeni | Vera Lisna | Nila Rifai | Rachmat Pambudy | Aceng Hidayat | Salahuddin El Ayyubi | Muhammad Findi A. | Sahara | Bonar M. Sinaga | D.S.Priyarsono | Amzul Rifin | R. Dikky Indrawan | M. Syaefudin Andrianto | Alim Setiawan Slamet | Lindawati Kartika | R. Dikky Indrawan | Fauzan Zamahsyarie | Rizka Amalia Nugrahapsari | Rita Nurmalina | Heny K. Suwarsinah

Penyunting:

M. Firdaus, Amzul Rifin, Sahara, Novindra, M. Syaefudin Andrianto

EKONOMI & MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN

IPB Press

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi ix

Dampak Ekonomi Kebijakan Produksi dan Perdagangan Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia 1

Strategi Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan 3F (*Fuel*, *Food*, dan *Finance*) pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21: Suatu Pendekatan Filsafat 23

Kebijakan Belanja APBN dalam Program Ketahanan Pangan 49

Ketahanan Pangan Indonesia dan WTO 65

Memetik Hikmah dari Gejolak Harga Pangan 87

Dampak Pertumbuhan Penduduk pada Tenaga Kerja Pedesaan dan Ketersediaan Pangan 95

Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur 107

Analisis Ekonomi Makro yang Memengaruhi Tingkat Konsumsi Pangan dan Nonpangan pada Masa Awal Reformasi 119

Membangun Lumbung Pangan Nasional melalui Petani *Agripreneur* 137

Agroekologi: Implementasi *Green Economy* di Sektor Pertanian untuk Kedaulatan Pangan 153

Islam dan Bencana Politik Dugaan Kartel 173

Pasar Ritel Modern, Agenda Kebijakan Pangan, dan Dampaknya terhadap Petani Kecil: Suatu Pembelajaran Bagi Indonesia 181

Dampak Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit dan *Domestic Market Obligation* pada Kesejahteraan Konsumen minyak Sawit di Indonesia 197

Dampak Bea Keluar Biji Kakao terhadap Ketersediaan Biji Kakao Dalam Negeri 215

Up Grading Manajemen Rantai Pasok Menjadi Rantai Nilai sebagai Upaya Mengatasi Masalah Harga dan Volume Pasokan dalam Perspektif Ketahanan Pangan Daging Sapi 225

Model Neraca Ketersediaan Gula Kristal Putih (GKP) Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan 239

Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian melalui *Talent Management System* 259

Penilaian Risiko pada Manajemen Rantai Pasok Pertanian: Penggunaan Metode *Failure Mode And Effect Analysis* 281

MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MELALUI PETANI AGRIPRENEUR

Rachmat Pambudy
Burhanuddin

Pendahuluan

Persoalan kekurangan pangan adalah persoalan utama dunia. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), sekitar 900 juta orang di negara-negara berkembang mengalami kelaparan. Angka yang sangat fantastis ini disebabkan oleh naiknya harga pangan yang tidak terjangkau banyak orang yang oleh Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) PBB, JosetteSheeran, disebut "*silent tsunami*" (The Middle East Institute 2008). Oleh karena itu, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyatakan bahwa kelaparan adalah tantangan moral setiap warga dunia. Dengan demikian, persoalan pangan bukan hanya persoalan bangsa Indonesia, tetapi persoalan dunia, sekitar 36 negara berjuang untuk mengatasi kerawanan pangan yang tersebar di Afrika dan Asia, termasuk di dalamnya Indonesia.

Menurut The Economist (2008), sekitar semiliar orang hidup dengan hanya sekitar US$1per hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya makanan yang mencapai 20% akan menciptakan kemiskinan absolut. Oleh karena itu, di beberapa negara yang mengalami krisis pangan dapat menjadi sebuah tantangan untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Bagaimana dengan kondisi pangan di Indonesia? Menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia yang diluncurkan pada bulan Mei 2010, 87 juta penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan terhadap kerawanan pangan (World

Food Programme 2012). Walaupun demikian, pada tahun 2030, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia dan akan meningkatkan perannya sebagai pemain utama dalam menyediakan pangan di tingkat regional dan global.

Hingga saat ini sentra produksi pangan di Indonesia adalah pedesaan dan petani kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pedesaan di Indonesia merupakan tempat aktivitas utama ekonomi penduduknya berbasis pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Aktivitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan sumber utama pangan merupakan kegiatan yang menggerakkan ekonomi pedesaan, sehingga pembangunan pertanian secara keseluruhan (*off farm* hulu, *on farm*, dan *off farm* hilir) identik dengan pembangunan pedesaan. Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, pembangunan pertanian masih menempatkan petani sebagai objek pembangunan. Petani, peternak, dan nelayan belum dianggap sebagai sumber daya penting yang dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Modal petani, peternak, dan nelayan yang berupa tenaga kerja produktif, pengetahuan, penguasaan teknologi, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam, belum dijadikan faktor penentu dalam membangun ekonomi pedesaan.

Kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi pangan, seperti kedelai, percepatan produksi gula, swasembada beras dan jagung, swasembada daging, dan lainnya menghasilkan nilai tukar petani yang rendah dan terus turun. Selain itu, cenderung menguras sumber daya alam pedesaan dan menimbulkan keluarnya kapital ke wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ini berarti, pedesaan kurang mendapat manfaat dari tingginya aktivitas produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, tetapi justru menjadi penyangga ekonomi bagi wilayah luar pedesaan. Bahkan, ada kecenderungan pembangunan menggusur sistem pertanian lokal dan akan menurunkan kinerja pertanian itu sendiri. Jika demikian, pertanian tidak lagi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, target-target pemerintah dalam swasembada pangan tidak tercapai dan tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pangan nasional sulit bersaing dengan pangan impor karena produksinya rendah, produsennya (petani, peternak, dan nelayan produksinya menurun), kualitasnya buruk dan harganya mahal. Akhirnya produk pangan impor mendominasi pasar domestik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pola pikir para perencana

pembangunan yang bisa menjadikan pedesaan sebagai unit terkecil lumbung pangan nasional. Ini berarti, perekonomian pedesaan yang digerakkan oleh pertanian, peternakan, dan perikanan untuk pangan secara agregat harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan petani, peternak, serta nelayannya mendapat manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka setiap upaya pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai basis pangan harus sensitif terhadap budaya masyarakat pedesaan termasuk wilayah pesisirnya. Pembangunan nasional harus menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variabel utama dalam proses pembangunan pedesaan yang memiliki kekhasan pada potensi dan keragaman produknya. Hal ini sejalan dengan UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dalam UU itu disebutkan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kuncinya adalah pada faktor petani sebagai sumber daya kapital yang memiliki *local wisdom* dan *indigenous knowledge* yang selama ini kurang dilibatkan dan kurang diperhatikan.

Salah satu variabel *human capital* dari petani yang diabaikan selama ini adalah kewirausahaan. Hal ini karena wirausaha selalu dikonotasikan dengan pelaku bisnis di luar pertanian.Wirausaha dan petani dianggap sebagai individu yang berbeda kutub, sehingga tidak mungkin ada istilah wirausaha pertanian atau kewirausahaan petani (*agripreneur*). Wirausaha merupakan produk lulusan sekolah bisnis dan dikaitkan dengan masyarakat bisnis nonpertanian, industri modern, produk-produk inovatif, *high-skill* dan teknologi tinggi, sedangkan petani sebaliknya, tidak berpendidikan, tradisional, gurem, *un-skill*, dan tidak ada teknologi. Hal ini berimplikasi pada produk-produk pertanian yang jarang disajikan sebagai produk modern, inovatif, dan mengandung nilai tambah. Menurut Peura *et al.* (2002), pengabaian kewirausahaan ini berasal dari tradisi pertanian itu sendiri, yakni petani tidak menganggap dirinya sebagai wirausaha.

Padahal, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, mempermudah

atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, serta melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional (UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012). Temuan Peura *et al.* (2002), pendapatan petani-petani Indonesia yang rendah disebabkan kepemilikan lahan pertaniannya yang sangat kecil. Bahkan, banyak petani Indonesia yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya sebagai buruh tani. Hal ini juga yang mengindikasikan perilaku wirausaha itu lebih tampak pada pemilik lahan daripada buruh taninya. Oleh karena itu, perlu kebijakan atau strategi baru supaya petani atau buruh tani berperilaku wirausaha, sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi di pedesaan dan pedesaan menjadi lumbung pangan nasional seperti yang diamanatkan dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012.

Entrepreneur dan Agripreneur

Wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang mengatur, mengoperasikan, dan menanggung risiko usaha dari sebuah bisnis. Wirausaha mampu mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya serta mampu mengembangkan produk. Menurut Kirzner (1973), wirausaha adalah memanfaatkan ketidaksempurnaan informasi untuk mendapatkan keuntungan. Schumpeter (2000) menegaskan bahwa wirausaha menggunakan sumber daya dengan cara baru (inovasi) sebagai pengenalan baru yang baik, menemukan metode produksi baru, membuka pasar baru, memperoleh sumber bahan baku baru, atau mengubah struktur industri yang sudah ada. Dengan demikian, wirausaha adalah individu yang mengalokasikan sumber daya dengan cara yang unik untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Wirausaha berbeda dengan pengusaha karena wirausaha dapat bekerja sebagai karyawan di dalam perusahaan, yang dikenal dengan *intrapreneur* (Hirsch *et al.* 2004). Walaupun wirausaha sebagai inovator, tetapi kegiatan kewirausahaan tidak sama dengan inovasi (Knudson *et al.* 2004). Ciri-ciri inti umum wirausaha adalah memiliki inisiatif, toleransi terhadap risiko, percaya diri untuk mengendalikan nasib, dan mampu memecahkan masalah (Schiebel 2002). Ini berarti bahwa wirausaha dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh lingkungannya.

Davidsson (2003) dan Kirzner (1973) berpendapat bahwa wirausaha merupakan perilaku kompetitif yang mendorong pasar, bukan hanya menciptakan pasar baru, tetapi menciptakan inovasi baru ke dalam pasar, sekaligus sebagai kontribusi nyata dari wirausaha sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Lebih tegas Wennekers dan Thurik (1999); Carree dan Thurik (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya, wirausaha memberikan kontribusi pada kinerja ekonomi dengan memperkenalkan inovasi, menciptakan perubahan, menciptakan persaingan, dan meningkatkan persaingan. Dari sudut pandang ini, wirausaha bertindak sebagai agen perubahan, membawa ide-ide baru untuk pasar dan merangsang pertumbuhan melalui proses persaingan perusahaan. Salah satu cara menumbuhkan kewirausahaan adalah melalui penyediaan informasi tentang bahan baku, mesin dan peralatan, informasi pasar dan layanan kebijakan, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kewirausahaan secara harfiah berarti mengandung pengertian transaksi ekonomi, sebagai pembuat pasar. Artinya, wirausaha adalah individu yang melakukan kegiatan ekonomi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Namun, kewirausahaan telah diabaikan oleh sebagian besar para ekonom modern. Kewirausahaan dipanggil dengan cara *ad hoc*, bila diperlukan, untuk menjelaskan aspek pembangunan ekonomi (Schumpeter 2000) dan dinamika pasar (Kirzner 1973). Meskipun ekonom cenderung mengabaikan kewirausahaan, tetapi ada beberapa yang berpendapat seharusnya kewirausahaan dimodelkan dan dimasukkan ke dalam teori ekonomi, seperti menghubungkan laba dengan ketidakpastian yang dikenal dengan *high risk high profit*. Ini berarti, kewirausahaan merupakan penilaian yang tidak dapat dinilai dari produk marginal atau tingkat upah.

Wirausaha pertanian (agripreneur) merupakan fenomena yang relatif baru. Era ekonomi pasar bebas mengharuskan petani menjadi lebih mandiri dan kewirausahaan pertanian mengembangkan keterampilan baru petani dan kemampuan fungsional agar petani kompetitif. Oleh karena itu, menurut Duczkowska-Małysz (1993) kewirausahaan pertanian diartikan sebagai semua kegiatan yang membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar bebas. Dengan kata lain, petani harus lebih adaptif dan mampu berubah dengan cepat. Petani harus memiliki perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) baru agar bisa bersaing menghadapi pasar global yang agresif. Pengembangan kewirausahaan pertanian mengubah kualitas manajemen produksi pertanian, mengurangi risiko kegagalan, dan mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Pengembangan kewirausahaan pertanian terkait erat dengan modernisasi pertanian di pedesaan seperti yang disyaratkan oleh Mosher (1970, 1980, 1991). Modernisasi pertanian yang tetap merekonstruksi pembangunan lingkungan pertanian yang lestari dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan. Contoh konkret adalah muculnya diversifikasi produk pertanian pada seluruh rantai produk di pedesaan, munculnya *captive market*, layanan jasa baru, optimalisasi bahan baku, dan efektivitas penggunaan aset pertanian. Dengan demikian, kewirausahaan pertanian adalah memposisikan pertanian sebagai sumber pendapatan utama petani di pedesaan melalui peningkatan nilai tambah (*value chain* dan *value added*). Menurut Dollinger (2003), kewirausahaan pertanian adalah pembentukan organisasi ekonomi petani yang inovatif untuk tujuan mendapatkan laba atau pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam kondisi risiko dan ketidakpastian.

Kewirausahaan pertanian adalah pola pikir dan proses petani untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi. Menurut Smit (2004), kewirausahaan akan terus menjadi aspek yang paling penting bagi pertanian saat ini dan di masa datang. Kewirausahaan pertanian akan menjadi kunci bagi para pengambil keputusan di lingkungan politik, sosial, dan ekonomi dalam membangun ekonomi pedesaan. Hal ini karena kewirausahaan pertanian akan menggeser pertanian yang tradisional ke pertanian modern yang menempatkan petani sebagai wirausaha.

Pada dasarnya petani secara tradisional telah memiliki karakter wirausaha karena telah mampu memproduksi dan menyerap tenaga kerja serta telah mengembangkan ekonomi pedesaan. Namun, Alsos *et al.* (2003) mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam hal pengetahuan tentang faktor-faktor yang memicu munculnya aktivitas kewirausahaan petani. Dengan demikian, kewirausahaan pertanian berbeda dengan kewirausahaan nonpertanian karena karakteristik pertanian dan petani berbeda dengan bisnis besar dan pengusaha, misalnya dikelola tenaga kerja keluarga dan skala usahanya sangat kecil.

Kewirausahaan pertanian menampilkan atribut kewirausahaan petani sepadan dengan mitra bisnisnya di nonpertanian. Hal ini menciptakan petani yang mampu mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan surplus ekonomi. Petani akan mampu mengupayakan kesempurnaan dalam kualitas dan volume produksi melalui adopsi teknologi, spesialisasi, dan diversifikasi. Oleh karena itu, kebijakan kewirausahaan pertanian harus secara bersamaan

memastikan persediaan makanan dan memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan. Namun bukan hal yang mudah untuk mengubah orientasi petani, sehingga harus dimulai dari petani-petani perintis yang cepat menerima perubahan, misalnya ketua kelompok tani atau tetua desa. Umumnya, faktor yang membuat petani terus berusaha tani adalah harga dari produk pertanian. Riepponen (1995) menegaskan bahwa wirausaha pertanian lebih didorong oleh faktor pasar daripada faktor nonpasar.

Beberapa faktor keberhasilan pengembangan wirausaha pertanian adalah aksesibilitas pada sumber daya pertanian, seperti modal, lahan, tenaga kerja, dan keahlian (Rantamaki-Lahtinen 2002). Akses pada modal melalui peningkatan akses terhadap kredit pertanian. Akses pada lahan melalui peningkatan luas lahan produksi, kebijakan pajak, dan nilai pasar dari lahan itu sendiri, serta regulasi pemerintah (*land reform*). Akses pada tenaga kerja melalui peningkatan upah, pasokan tenaga kerja, dan usaha tani mandiri baru. Akses pada keahlian melalui kebijakan bantuan teknis, penelitian, serta pelatihan dan pendidikan. Faktor lingkungan kunci lain yang memengaruhi kewirausahaan pertanian adalah akses ke modal ventura, dukungan teknis pertanian, tenaga kerja terampil, pajak rendah di pertanian dan akses ke pasar baru. Ini berarti bahwa lingkungan politik, sosial, dan budaya tidak bisa diabaikan. Hal ini karena di antara faktor-faktor politik yang paling penting adalah pajak, peraturan, dan insentif atau subsidi.

Membangun Desa Lumbung Pangan

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Karenanya pemenuhan hak atas pangan tersebut tidak hanya untuk memenuhi hak asasi manusia atau pemenuhan kewajiban moral kepada rakyat Indonesia semata, tetapi sebagai investasi ekonomi dan sosial bagi terwujudnya generasi yang lebih baik di masa depan (Pesan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 2010).

Salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan selain meningkatkan kualitas tanah dan manajemen perairan untuk meningkatkan hasil panen adalah penggunaan teknik lokal yang tepat dan inovatif (Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme 2009). Hal itu berarti bahwa strategi ini menempatkan pedesaan yang memiliki kultur beragam sebagai fokus unit wilayah pengembangan dan petani yang kreatif dan inovatif (petani berkarakter wirausaha) sebagai subjek utamanya. FAO (2008) menyatakan

bahwa peran pertanian dalam memproduksi pangan adalah sebagai mesin pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai mesin pertumbuhan bagi ekonomi pedesaan.

Dengan demikian, keberagaman sistem sosial pedesaan Indonesia tidak menjadi penghalang, tetapi justru akan mendorong munculnya karakter wirausaha. Dengan memahami orientasi sosial masyarakat desa, maka pengembangan kewirausahaan pertanian lebih mudah dicapai. Pada akhirnya perekonomian pedesaan tumbuh dinamis karena petani sebagai pelaku utamanya dalam berproduksi menggunakan infrastruktur pengetahuan dan berorientasi pada pasar.

Dalam konteks peningkatan kapasitas petani, menjadi petani berkarakter wirausaha, program WFP di Indonesia mengambil pendekatan ganda, yakni menanggapi kebutuhan pangan dan gizi langsung pada masyarakat yang paling rentan, sekaligus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas petani yang mendorong kepemilikan lokal dan keberlanjutan (WFP 2012). WFP juga membangun kemampuan dan keahlian aset komunitas pertanian melalui Program Padat Karya Pangan (*Food for Asset*) dan Program Padat Karya Pangan Pelatihan (*Food for Training*). Program ini sedang berjalan sampai tahun 2015. Dengan demikian, desa dan petani (agripreneur) menjadi entitas esensial dalam mengentaskan kerawanan pangan.

Ada tiga alasan pengembangan kewirausahaan pertanian dalam membangun desa lumbung pangan di Indonesia. *Pertama*, petani di pedesaan membutuhkan sarana dan sumber daya untuk mengidentifikasi dan membangun aset untuk membuat pilihan usaha tani yang tepat dan memiliki keterbukaan untuk belajar dari pengalaman orang lain. *Kedua*, telah terbentuk kerjasama antar petani dan petani dengan lembaga-lembaga ekonomi, pendidikan, dan pemerintah. *Ketiga*, fokus kewirausahaan adalah pengembangan individu petani yang memiliki karakteristik demografi dan pola hidup beragam, tetapi merupakan pelaku utama ekonomi pedesaan berbasis pertanian.

Dengan tidak adanya kewirausahaan pertanian, maka peluang di bidang pertanian akan diambil oleh orang luar desa, terutama wirausaha perkotaan yang mengarah ke eksploitasi dan perampasan kerja para petani. Memperhatikan laju pengangguran yang tinggi pedesaan yang menghambat pertumbuhan pertanian, maka perlu mendorong promosi kewirausahaan pertanian, yang pada gilirannya dapat mengatasi masalah produksi pertanian dan profitabilitas rendah yang selama ini diterima petani.

Kewirausahaan pertanian akan menarik pengusaha besar ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Melalui kewirausahaan pertanian, adanya perusahaan besar yang selama ini menyerap tenaga kerja pedesaan ternyata memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk membangun aset. Kemitraan dengan perusahaan besar dapat mempercepat pengembangan kewirausahaan pertanian di pedesaan yang tidak hanya menumbuhkan usaha tani baru, tetapi juga usaha jasa dan usaha nonpertanian. Misalnya, usaha kerajinan kayu, pembuat tembikar, usaha makanan atau katering, salon, reparasi elektronik, dan lainnya.

Beberapa bentuk promosi kewirausahaan pertanian dapat dikembangkan di pedesaan (Hegde 2005), yakni (1) menjadikan keluarga petani sebagai suatu unit usaha pertanian (usaha mikro-kecil) untuk mengoptimalkan produksi dengan memanfaatkan teknologi terbaik, sumber daya dan permintaan di pasar dan (2) pada level desa menjadi penyedia input, sarana, dan prasarana produksi dan layanan jasa lainnya, termasuk pengolahan dan pemasaran. Jika di pedesaan ada layanan pengolahan, maka kerugian pascapanen bisa dihindari dan memberikan lapangan kerja serta pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Berkembangnya keluarga petani menjadi unit usaha tani akan berkontribusi pada produktivitas pedesaan sebagai penghasil pangan. Namun, secara luas akan sangat bervariasi dampaknya, sehingga akan terjadi perbedaan dalam struktur produksi pangan antarpedesaan sebagai ciri keunikan berdasarkan keunggulan komparatif dan kopetitif masing-masing pedesaan. Bahkan ada kecenderungan mengarah pada *one village one produk* (OVOP).

Namun demikian, harus dipahami bahwa di pedesaan ada banyak tipe petani. Menurut Lauwere *et al.* (2002) ada lima kelompok petani, yakni petani yang membuat perubahan ekonomi, petani yang mengakui bahwa keberhasilan finansial perlu diimbangi dengan peran sosial dan lingkungan, petani yang sukses dengan fokus pada kegiatan pertaniannya, petani yang melakukan diversifikasi usaha tani, dan petani yang enggan untuk merangkul perubahan.

Oleh karena itu, harus ada dukungan politik dari pemerintah untuk secara bulat mendukung promosi kewirausahaan pertanian. Untuk itu, kebijakan subsidi sebaiknya diganti dengan sistem insentif pasar dan transfer teknologi dan pengetahuan ditingkatkan ke petani di pedesaan. Pemerintah dapat mulai menggerakkan kembali peran penyuluh pertanian dengan menambah kapasitas pengetahuan kewirausahan. Sebagai fasilitator, pemerintah menjadi

jembatan bagi petani dengan wirausaha luar desa dan lembaga penelitian dan pendidikan.

Para ekonom dan sosiolog pedesaan telah menyarankan supaya petani akses pada pembiayaan modal dalam konteks kewirausahaan pertanian. Meskipun biaya kredit sering menjadi kendala, tetapi isu yang paling penting adalah apakah wirausaha petani memiliki akses yang cukup terhadap kredit. Dengan memahami permintaan kredit pedesaan, penting untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal ini karena jika petani sudah beralih ke sumber kredit formal daripada kredit informal, maka berarti produksi pangan telah selaras dengan ekonomi pasar yang semakin kompetitif.

Membangun pedesaan sebagai lumbung pangan sering mengabaikan faktor pendidikan. Hal ini tampak jelas dengan kondisi pendidikan di pedesaan yang sebagian besar petani, belum tuntas pendidikan dasar. Padahal pendidikan yang lebih tinggi berperan penting dalam mempromosikan kewirausahaan pertanian. Peran penting pendidikan tersebut berupa inovasi dan memulai usaha tani baru. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan dan meningkatkan produktivitas produksi pangan.

Berkurangnya tingkat pengangguran di pedesaan sebagai akibat dari tingkat penyerapan tenaga kerja dan munculnya lapangan kerja pertanian baru, berdampak positif terhadap produksi pangan. Namun hal tersebut belum cukup jika tidak diikuti oleh meningkatnya upah dan pendapatan usaha tani serta mobilitas tenaga kerja di pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan keahlian atau keterampilan petani melalui transfer pengetahuan dan teknologi harus diintensifkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, seperti pelatihan, magang, dan lainnya. Ini berarti kewirausahaan pertanian selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan juga mampu meningkatkan pendapatan yang efek *multiplier*-nya akan menumbuhkan perekonomian pedesaan berbasis pangan.

Efek *multiplier* kewirausahaan pertanian ini membuat petani di pedesaan mampu mengidentifikasi peluang pasar dalam ekonomi lokal, regional, nasional atau internasional, sehingga petani dapat mengembangkan produknya untuk pasar-pasar tersebut. Jika demikian, petani dapat memperkirakan dampak kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan swasembada pangan, misalnya pajak dan subsidi atau penetapan harga-harga produk pertanian. Di lain pihak, pemerintah juga dapat mempertimbangkan biaya kebijakan publik, seperti

keringanan pajak dan subsidi atau kebijakan harga untuk mempromosikan kewirausahaan pertanian. Namun demikian, perlu diperhatikan adanya kendala dari adanya tumpang tindih dalam kewirausahaan pertanian, yakni tumpang tindih antara usaha tani dan keluarga petani. Karena faktanya, ada interaksi kuat dalam pengambilan keputusan petani sebagai wirausaha untuk keberlanjutan usaha taninya sebagai kepala keluarga.

Hasil penelitian Dabson (2005) menyimpulkan bahwa lebih dari dua per tiga dari semua pekerjaan baru yang diciptakan di Amerika Serikat dikembangkan melalui semangat kewirausahaan yang melibatkan usaha kecil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi pedesaan dan kewirausahaan pertanian sangat jelas berhubungan. Fakta ini memberi keyakinan bahwa perekonomian pedesaan di Indonesia pun juga dapat digerakkan oleh kewirausahaan, yakni kewirausahaan pertanian. Hal ini karena wirausaha petani mampu mendiversifikasi produknya, menciptakan pasar baru, dan memanfaatkan teknologi baru di lingkungan pedesaan yang pada akhirnya menjadi lumbung pangan nasional.

Penutup

Ekonomi global yang semakin kompetitif mengharuskan restrukturisasi pembangunan pedesaan sebagai penyedia pangan, yakni restrukturisasi pembangunan pertanian sebagai aktivitas ekonomi utama di pedesaan. Restrukturisasi ini meliputi dua fundamental ekonomi, yaitu mencari sumber-sumber keunggulan kompetitif yang unik untuk membangun lumbung pangan jangka panjang yang berkelanjutan dan mengidentifikasi aset yang dapat dibangun untuk mendukung keunggulan kompetitif tersebut. Kedua fundamental ekonomi ini diyakini akan tercapai melalui pengembangan kewirausahaan pertanian.

Kewirausahaan pertanian digerakkan oleh daya inisiatif dan kreativitas petani yang pada gilirannya akan memperbaiki kemampuan pedesaan memproduksi pangan dan menarik investasi. Meningkatkan investasi usaha tani berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja dan inovasi dari aktivitas ekonomi di pedesaan. Pemerintah sebagai regulator memberikan dukungan penuh pada produksi pangan dalam negeri dan mempromosikan kembali petani gurem berkarakter wirausaha dengan pendekatan agroekologi lokal untuk dan sistem pangan. Akhirnya, kewirausahaan pertanian merupakan elemen kunci dari strategi pembangunan pedesaan sebagai lumbung pangan Indonesia.

Daftar Pustaka

Acemoglu, Daron and Robinson, J.A., 2012. Why Nations Fail : The Origins Of Power, Prosperity, And Poverty. United States Of America.. Profile Books LTD.

Alsos, G. A., Ljunggren, E., and Pettersen, L.T. 2003. Farm based entrepreneurs: What triggers the start up of new business activities. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10 (4).

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 2004. Ekonomi Padi dan Beras. Jakarta. Departemen Pertanian.

Bygrave, W. D. 2004. The Portable MBA in Entrepreneurship: Third Edition/edited by William D. Bygrave , Andrew Zacharakis. – Ed. 3 – New Jersey : John Willey & Sons Inc.

Carree, M. A. and R. Thurik. 2003. The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. in David B. Audretsch and Zoltan J. Acs (eds.), Handbook of Entrepreneurship Research, Boston/Dordrecht:Kluwer-Academic Publishers, pp. 437–471.

Cipolla, C. M. 1981. Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000–1700, 2nd Edition, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Dabson, B. 2005. Entrepreneurship as a Core Economic Development Strategyfor Rural America. Truman School of Public Affairs, University of Missouri-Columbia.

Davidsson, P. 2003, The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions. in Jerome A. Katz andDean Shepherd (eds.), Cognitive Approaches to EntrepreneurshipResearch, Advances in Entrepreneurship,Firm Emergence and Growth 6, pp. 315–372.

Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI and World Food Programme (WFP). 2009. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia. PT Enka Deli Jakarta.

Dollinger, M. J. 2003. Entrepreneurship–strategies and resources. Pearson International Edition, New Jersey.

Duczkowska-Małysz, K. 1993. Entrepreneurialism of rural areas; multifunctional villages. Warszawa.

FAO.2008. Global Food SecurityShort and Long-Term Perspectives and Challenges. FAO Policy Learning Programme.

Hegde, N.G. 2005.Entrepreneurs Experiences in Agriculture.Presented at the VII Agricultural Science Congress at the College of Agriculture, Pune,February 2005. 16-18.

Ikatan Sarjana Ekonomi Orde Baru. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : 1. 1945 - 1959. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Ikatan Sarjana Ekonomi Orde Baru. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir :2. 1959 - 1966. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Ikatan Sarjana Ekonomi Orde Baru. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : 3. 1966 - 1982. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Ikatan Sarjana Ekonomi Orde Baru. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : 4. 1982 - 1997. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Ikatan Sarjana Ekonomi Orde Baru. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : 5. 1997 - 2005. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Kirzner, I. M. 1973. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.

Lauwere, C., de, Verhaar, K. and Drost, H. 2002.The Mysteryof Entrepreneurship; Farmers looking for new pathways in a dynamic society, In Dutch withEnglish summary.Wageningen University and Research Centre.

Lazonick, W. 1991. Business Organization and the Myth of the Market Economy, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McC!elland, D.C. 1961. The Achieving Society. D. Van Nostrand. Place of Publication: Princeton, NJ. Publication.

Mosher, A.T., 1981. Menggerakkan dan Membangun Pertanian : Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. Jakarta. C.V. Yasaguna.

Norton, G.W., Alwang, J., Masters, W.A., 2006. The Economics Of Agricultural Development World Food Systems and Resource Use. New York. Routladge

Pambudy. R., Mardianto, S., dkk. 2002. Kebijakan Perberasan di Asia, Hasil Pertemuan Regional di Bangkok, Thailand, Oktober 2002. Jakarta. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Peura, J., P. Siiskonen, and K.M. Vesala. 2002. Entrepreneurial identity among the rural small business owner-managers in Finland. In Rurality, Rural Policy and Politics in a Nordic-Scottish Perspective. HW Tanvig (ed.). Esbjerg: Danish Center For Rural Research and Development. Working Paper 1/2002.

Rantamaki-Lahtinen, L. .2002. Finnish pluriactive farms – The common but unknown rural enterprises. In Ruraiity, Rural Policy and Politics in a Nordic-Scottish Perspecitve. HW Tanvig (ed.). Esbjerg: Danish Center for Rural Research and Development. Working paper 1/2002.

Riepponen, O. 1995. Succeeding as a Rural Entrepreneur. University of Helsinki, Institute for Rural Research and Training, Mikkeli Publications.

Rogers, Jim. 2007. Hot Commodities : How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market. UK. John Willey & Sons Ltd.

Sajogyo dan Collier. W.L., 1986. Budidaya Padi di Jawa. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia dan P.T. Penerbit Gramedia.

Sawit, M. Husein. 2004. Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia, Kajian Komparasi dari Perspektif Indonesia. Jakarta. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Smit, A.B. 2004. Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in Agriculture. In: Bokelman, W. (2004), Acta Horticulture No. 655, Proceedings of the 15th International Symposium on Horticultural Economics and Management, Berlin, Germany.

Stiglitz, Joseph E. 2012. The Price Of Inequality. United States Of America. W. W. Norton & Company Ltd.

Stiglitz, Joseph. 2002. Globalization And Its Discontents. United State of America. W. W. Norton & Company Ltd.

The Middle East Institute. 2008."Silent Tsunami" — The Global Food Crisis: Practitioners' Views from the Region. Viewpoints, nomor 9, November 2008.

The Economist. 2008. The Silent Tsunami: food prices are causing misery and strife around the world,radical solutions are needed. April 17th 2008. http://www.economist.com/node/11050146, 18 Mei 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012TentangPangan.

Wennekers, S. and R. Thurik. 1999. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics 13(1), 27–55.

WFP Indonesia. 2012. WFP Indonesia 2012 in Review. Website: wfp.org/countries/Indonesia. Wisma Keiai 9th Floor, Jakarta.

Wie, Thee Kian. 2004. Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru : Esai-esai. Jakarta. Penerbit Buku Kompas

Zanden, J.L.V., dan Marks, Daan. 2012. Ekonomi Indonesia 1800-2000 : Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta. PT Gramedia.